



EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM PENGELOLAAN KEBUN SATU MANAJEMEN PADA PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (Studi Kasus : Kebun Plasma Tabara PTPN XIII Kalimantan Timur)

Muhammad Akmal Agustira, Teguh Wahyono, dan Rizki Amalia

Abstrak Revitalisasi perkebunan merupakan program pemerintah untuk mempercepat pengembangan perkebunan rakyat. Program ini didukung oleh kredit investasi dengan subsidi bunga pada masa tenggang oleh pemerintah. Pola pengembangan yang diterapkan pada program ini melalui sistem kemitraan dengan pengelolaan kebun satu manajemen (PSM). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme, tingkat keberhasilan dan permasalahan pelaksanaan PSM. Penelitian menerapkan metode survei dengan teknik pengambilan sampel petani responden dan lokasi secara *purposive*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSM yang diterapkan di plasma Tabara dititik beratkan pada pengelolaan bersama antara Perusahaan mitra dengan pekebun peserta revitalisasi dalam wadah koperasi unit desa (KUD) dan kelompok tani (Koptan). Pihak perusahaan turun langsung melakukan pembinaan dan pendampingan petani plasma dengan bekerjasama dengan KUD melakukan perawatan kebun, mengadakan kredit sarana produksi, dan administrasi kebun. Permasalahan utama PSM yaitu biaya pembangunan kebun melebihi *planfond* kredit yang ditentukan, fungsi kelembagaan KUD, proses administrasi yang kurang baik, pola pembagian hasil 30 : 20 : 50, yang dinilai kurang adil bagi petani, dan pembagian kredit yang kurang merata dengan berbagai kondisi lahan. Upaya perbaikan yang dilakukan yaitu pemenuhan standar persyaratan lahan, perbaikan mekanisme penentuan biaya maksimum, penguatan kelembagaan KUD,

transparansi, pemberdayaan pekebun rakyat dan perbaikan administrasi.

Kata Kunci : revitalisasi, Kemitraan, PSM, kelapa sawit.

Abstract *Plantation revitalization program is to accelerate the development of smallholders. The program is supported by investment loans with subsidized interest rates on the grace period by the government. The scheme of that implement through a partnership with integrated plantation management system (IPM). This study aims to identify the mechanism, the success and implementation of the IPM issues. The study applied survey method with sampling smallholders respondent and locations purposively. The results showed that the PSM is applied in plasma Tabara emphasis on co-management of the Company partners with smallholders in the revitalization of the village cooperative and farmer groups. The company fell immediately to provide guidance and assistance to farmers in collaboration with village cooperative doing lawn care, hold the means of production credits, and the administration of the plantation. The main problem is the cost of building the plantation exceed specified credit planfond, village cooperative unit institutional function, the lack of good administration, the pattern of 30: 20: 50 sharing that were considered less equitable for the farmers, and the uneven distribution of credit with various of land conditions. Improvement efforts implementer the compliance requirements of land, the cost of repair mechanisms for determining the maximum, institutional strengthening cooperatives, transparency, empowerment of the people and improved administration planters.*

Keywords : Revitalization, partnership, IPM, Oil Palm.

Penulis yang tidak disertai dengan catatan kaki instansi adalah peneliti pada Pusat Penelitian Kelapa Sawit

Muhammad Akmal Agustira (✉)
Pusat Penelitian Kelapa Sawit
Jl. Brigjen Katamso No. 51 Medan, Indonesia
Email: agustira-akmal@yahoo.com

PENDAHULUAN

Strategisnya peran kelapa sawit disikapi oleh pemerintah dengan melakukan program revitalisasi perkebunan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 33/Permentan/OT.140/7/2006 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 117/PMK06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP). Program revitalisasi perkebunan merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi tanaman perkebunan, yang didukung kredit investasi dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan, dan pemasaran hasil (Ditjenbun, 2007). Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi perkebunan yang termasuk program revitalisasi perkebunan dengan target pengembangan sebesar 1,5 juta ha terdiri dari perluasan sebanyak 1.375.000 ha dan peremajaan seluas 125 ha yang dimulai tahun 2007 hingga 2010.

Namun, pelaksanaan program revitalisasi perkebunan mengalami berbagai permasalahan, diantaranya lahan yang diajukan masyarakat masuk kawasan hutan, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) yang kurang jelas, proses pelepasan kawasan hutan, tidak adanya fasilitas percepatan pembuatan sertifikat lahan (Dja'far *et al*, 2012). Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya realisasi kredit revitalisasi kelapa sawit dimana hingga 2011 baru mencapai 164.834 hektar atau 11% dari target 1.500.000 hektar (Zuhri, 2011). Tidak tercapainya target program revitalisasi tersebut menyebabkan pemerintah memperpanjang program revitalisasi perkebunan hingga tahun 2014.

Salah satu pelaksanaan program revitalisasi perkebunan kelapa sawit yang telah berjalan adalah di kebun plasma Tabara PTPN XIII kabupaten Paser Kalimantan Timur. Pengelolaan kebun revitalisasi perkebunan dilakukan dengan sistem Pengelolaan Satu Manajemen (PSM) sesuai dengan pedoman umum yang terdapat pada program revitalisasi perkebunan (Ditjenbun, 2007). Penelitian ini bertujuan untuk :

- 1) Mengidentifikasi mekanisme pelaksanaan sistem PSM pada program revitalisasi perkebunan

- 2) Mengidentifikasi tingkat keberhasilan pelaksanaan sistem PSM pada program revitalisasi perkebunan berdasarkan tingkat produktivitas dan pendapatan dan indikator tingkat keberhasilan yang terdapat pada pedoman umum revitalisasi perkebunan.
- 3) Menganalisis permasalahan dalam pelaksanaan sistem PSM.
- 4) Mengajukan saran perbaikan dalam pelaksanaan sistem PSM.

BAHAN DAN METODE

Penelitian menerapkan metode survey yaitu penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data (Singarimbun *et al*, 1989). Lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* yaitu kebun plasma Tabara PTPN XIII di kabupaten Paser Kalimantan Timur yang melaksanakan program revitalisasi dengan sistem PSM. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* (Sugiyono, 2009). Pemilihan metode ini berdasarkan pertimbangan bahwa responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian, dalam hal ini yaitu responden yang dianggap *representative* dan mengetahui hal-hal yang terkait dengan sistem PSM pada program revitalisasi perkebunan.

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan teknik pengumpulan melalui *Focus Group Discussion* (FGD). FGD adalah metode pengumpulan data yang sistematis berbentuk sebuah kelompok diskusi yang terencana untuk mendapatkan berbagai ide atau persepsi tentang topik tertentu (Kriyantono, 2006). FGD dilakukan untuk mendapatkan proses pelaksanaan sistem PSM dan kendalanya. Peserta FGD terdiri dari ketua dan perwakilan kelompok dan KUD, manajemen kebun plasma Tabara dan Dinas perkebunan Kabupaten Paser. Dari hasil FGD dihasilkan perumusan kuesioner untuk mengidentifikasi secara terinci mengenai prioritas permasalahan dilakukan dengan pendekatan *Analytic Hierarchy Process* (AHP). AHP merupakan model pengambil keputusan yang komprehensif dengan memperhitungkan hal-hal yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. AHP memungkinkan ke struktur suatu



sistem dan lingkungan kedalam komponen saling berinteraksi dan disatukan dengan pengukur dan pengaturan dampak dari komponen kesalahan sistem (Saaty,2008). Data diperoleh dari responden terdiri dari peserta program, ketua dan pengurus koperasi dan kelompok, asisten kebun, manajer kebun, dinas perkebunan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan *software Expert Choice v.11* untuk memperoleh faktor yang paling dominan mempengaruhi pelaksanaan sistem PSM pada program Revitalisasi perkebunan kelapa sawit.

Data sekunder dikumpulkan dari data yang dimiliki oleh perusahaan, koperasi dan kelompok tani serta dinas perkebunan kabupaten Paser. Data yang diperoleh berupa data rencana dan realisasi pelaksanaan sistem PSM, data produksi, data keuangan kelompok tani dan koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit di Kebun Plasma Tabara PTPN XIII

Revitalisasi perkebunan melalui kemitraan oleh plasma Tabara PTPN XIII bersama pekebun rakyat di Kabupaten Paser dengan komoditi kelapa sawit. Luas kebun revitalisasi yang telah dibangun yaitu 1.010 ha terdiri dari 740 ha tanaman baru dan 270 ha tanaman replanting. Pola pengembangan yang dilakukan yaitu pola Pengelolaan Satu Manajemen (PSM). Pada prinsipnya, pola pengembangan yang diterapkan

disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah berdasarkan saling keterbukaan, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan (Saptana, 2006).

Sistem Pengelolaan Kebun Dalam Satu Manajemen (PSM)

Pengelolaan kebun dalam satu manajemen adalah pengelolaan seluruh kebun baik mitra usaha maupun milik pekebun yang dilakukan oleh mitra usaha mulai dari persiapan, pengelolaan kebun, pengelolaan dan pemasaran atau sebagian dari kegiatan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, yang ditujukan untuk tetap menjaga kualitas kebun dan kesinambungan usaha (Ditjenbun, 2007). Kriteria yang diperlukan pengelolaan kebun dalam satu manajemen antara lain :

1. Pengelolaan sistem manajemen dilaksanakan minimal selama satu siklus tanaman.
2. Adanya perjanjian kerjasama antara petani peserta/koperasi dengan mitra usaha mengenai pengelolaan satu manajemen usaha yang memuat antara lain pengelolaan kebun, tenaga kerja, pengolahan hasil, pemasaran dan pembagian hasil serta hak dan kewajiban masing-masing pihak seperti angsuran kredit, pengalokasian dan untuk peremajaan.
3. Petani peserta diutamakan sebagai pekerja dan terlibat langsung dalam pengawasan pengelolaan kebun.

Tabel 1. Realisasi penanaman kebun revitalisasi di Plasma Tabara PTPN XIII Kalimantan Timur .

No	Lokasi	Tanaman Baru		Replanting	
		Tahun Tanam	Luas (ha)	Tahun Tanam	Luas (ha)
1	Brewebe	2006	100	-	-
2	Sindet B	2007	150	-	-
3	Modang 46	2007	46	-	-
4	Tiwei	2008	104	-	-
5	Timbere A	2009	240	-	-
6	Timbere B	2010	100	-	-
7	Sawit jaya	-	-	2011	270
Total			740		270

Sumber : Kebun Plasma Tabara PTPN XIII

Pola ini diharapkan dapat memperbaiki pola PIR yang telah berjalan selama ini. Pola PIR pada program Revitalisasi perkebunan dimaksud untuk menjaga agar kualitas kebun tetap sesuai dengan baku teknis yang ada meskipun telah dialihkan kepemilikan kebun kepada petani peserta, sehingga terjamin kepastian dan keberlanjutan usaha.

Kebun plasma Tabara PTPN XIII menerapkan sistem ini karena belajar dari pengalaman pengembangan kemitraan dengan pola PIR dan KKPA, dimana kebun plasma kurang terurus. Hal ini berdampak pada rendahnya produktivitas, sehingga perusahaan kurang pasokan TBS dan angsuran kredit menjadi berat. Dengan sistem PSM pembangunan kebun diharapkan dapat sesuai dengan standar teknis, terjaminnya pasokan TBS dan angsuran kredit akan terjaga sehingga akan ideal untuk jangka panjang. Selain itu, Standar teknis operasional kebun plasma sama dengan operasional kebun inti sampai dengan satu siklus tanaman kelapa sawit, administrasi kebun plasma dibuat transparan khususnya rekapitulasi biaya, pendapatan, serta angsuran kredit petani. Petani melalui kelompok tani dan KUD dapat melakukan pengawasan dalam perawatan kebun. Untuk menjaga operasional kebun dan pembayaran kredit maka pola pembagian hasil dilakukan di plasma Tabara dengan sistem 30 : 50 : 20, dimana 30% untuk pembayaran kredit, 50% untuk operasional kebun dan 20% untuk petani. Pola ini bukan menjadi patokan dalam 1 siklus tanaman, dimana proporsi operasional kebun dan petani dapat berubah lebih besar atau lebih kecil sesuai dengan kondisi tanaman.

Disisi lain, dari hasil wawancara dan FGD dengan responden pekebun peserta revitalisasi, pola PSM sangat membantu dalam membangun kebun terutama dalam permodalan dalam pengelolaan kebun. Pola PSM dapat menanggung biaya pupuk, herbisida, perawatan jalan dan parit serta biaya lainnya. Kultur teknis kebun dapat dilakukan dengan standar sehingga produktivitas kebun revitalisasi lebih tinggi jika dibandingkan dengan kebun swadaya dan pola KKPA.

Namun, menurut hasil diskusi dengan para responden, kekurangan pola PSM yaitu pekebun merasa kurang mandiri dan tidak sepenuhnya menguasai lahan. Disamping itu, pola bagi hasil 30 : 50 : 20 bukanlah pola yang adil bagi petani. Hal tersebut senada dengan Serikat Pekebun Kelapa

Sawit (SPKS) yang menyatakan pola PSM mengabaikan potensi petani. Kebijakan revitalisasi perkebunan dengan pola tersebut tidak melihat potensi yang berkaitan dengan inisiatif, kemampuan mengelola kebun, dan kemampuan meningkatkan produktivitas sesuai dengan standar. Perkebunan rakyat yang bermitra dengan perusahaan yang menerapkan pengelolaan satu manajemen akan menjadi buruh sedangkan perusahaan sebagai pengelola.

Pada prakteknya di lapangan, sistem pola PSM yang diterapkan di plasma Tabara dititik beratkan pada pengelolaan bersama antara PTPN XIII dengan pekebun peserta revitalisasi dalam wadah koperasi unit desa (KUD) dan kelompok tani (Koptan). Pihak perusahaan turun langsung melakukan pembinaan dan pendampingan petani plasma dengan bekerjasama dengan KUD melakukan perawatan kebun, mengadakan kredit sarana produksi, dan administrasi kebun. Sistem PSM di plasma Tabara dapat dilihat pada Tabel 2.

Berdasarkan kondisi tersebut, pola hubungan kerjasama yang dilakukan oleh manajemen kebun plasma PTPN XIII dengan pekebun revitalisasi secara teoritis digolongkan ke dalam jenis usaha yang disebut *contract farming*. Pola ini diterapkan dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, dan membuka akses transfer teknologi (Rustiani *et al.*, 1997). Konsep *contract farming* dalam revitalisasi perusahaan mitra sebagai perusahaan yang melaksanakan pembangunan kebun, fungsi bimbingan, penyediaan sarana produksi, kredit, pemasaran sambil mengusahakan usaha tani yang dimiliki. Sedangkan petani sebagai penyedia tanah dan tenaga kerja yang menyediakan produk berupa TBS untuk sebuah usaha sentral sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian/kontrak. Dengan demikian posisi kedua belah pihak setara (Rajekshah, 2009).

Tingkat Keberhasilan dalam Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan di Kebun Plasma Tabara

Dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu program harus memiliki indikator yang jelas. Indikator adalah ukuran kualitatif dan kuantitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan (Bastian, 2006). Indikator



Tabel 2. Sistem pelaksanaan pola PSM di Plasma Tabara.

No.	Kegiatan	Penanggung jawab	Keterangan
1.	Perencanaan kerja dan anggaran	Diajukan oleh KUD/Koptan	Hal ini sama dengan manajemen kebun inti, dimana koperasi/kelompok disejajarkan dengan pengelola afdeling
2.	Pengorganisasian kerja di lapangan	Penyediaan tenaga kerja dalam perawatan maupun panen dikoordinasi oleh KUD/Koptan. Jika KUD tidak dapat menyediakan, maka pengelolaan tenaga kerja dilakukan oleh PTPN.	Tenaga kerja dapat dilakukan oleh kelompok tani maupun di luar kelompok tani.
3.	Pengadaan input	Disediakan oleh KUD/Koptan melalui dana operasional kebun.	Untuk kebutuhan dana dalam jumlah besar, dapat dipinjam dari perusahaan dengan menggunakan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
4.	Pengawasan kerja dan anggaran	Dilakukan secara bersama oleh KUD/Koptan dan manajemen kebun.	Masing -masing pihak membuat sistem administrasi yang mencakup rekapitulasi biaya, pendapatan, dan angsuran kredit petani

keberhasilan pelaksanaan program revitalisasi perkebunan berdasarkan Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan adalah (i) terbangunnya kebun sesuai rencana dan memenuhi standar teknis, (ii) tersalurnya kredit pembiayaan dan subsidi bunga pembangunan kebun (iii) terlaksananya konversi kredit tepat waktunya (iv) terealisasi angsuran kredit tepat waktunya, (v) meningkatnya pendapatan petani, (vi) meningkatnya penyerapan tenaga kerja, (vi) berkembangnya ekonomi wilayah.

Terbangunnya kebun sesuai rencana dan memenuhi standar teknis

Realisasi pembangunan kebun yang telah dilaksanakan di kebun plasma Tabara adalah seluas 1.110 ha atau sebesar 68,2% dari rencana seluas 1.480 ha (Tabel 3). Untuk pembangunan kebun baru di semua lokasi tidak bermasalah. Permasalahan pembangunan kebun terdapat di desa Sawit Jaya yang merupakan lahan yang membutuhkan replanting, dimana dari 740 ha yang direncanakan, hanya

Tabel 3. Rencana dan realisasi pembangunan kebun revitalisasi di Plasma Tabara,.

No	Lokasi	Rencana	Realisasi	Persentase
1	Brewebe	100	100	100,00%
2	Sindet B	150	150	100,00%
3	Modang 46	46	46	100,00%
4	Tiwei	104	104	100,00%
5	Timbere A	240	240	100,00%
6	Timbere B	100	100	100,00%
7	Sawit jaya	740	270	36,49%
Total		1.480	1.010	68,24%

Sumber : Kebun Plasma Tabara PTPN XIII

terbangun 270 ha kebun revitalisasi di tahun 2011. Realisasi tersebut sebenarnya direncanakan pada tahun 2007, namun baru terealisasi pada tahun 2011.

Berdasarkan tinjauan di lapangan, pembangunan kebun belum menerapkan praktik kultur teknis yang tepat, terutama terkait dengan pembuatan infrastruktur kebun. Sebagai contoh, desa Tiwei yang memiliki topografi bergelombang berbukit dengan kemiringan >15% tidak dibuat teras kontour. Secara kultur teknik dengan kondisi topografi tersebut mutlak memerlukan teras kontour yang dilakukan sebelum penanaman (Lubis, 2008). Hal tersebut tidak dilakukan karena terbatas biaya sesuai dengan *plafond standar biaya maksimum* yang ditentukan oleh Ditjenbun. Namun dalam perawatan kebun, tetap dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kultur teknis dan *plafond standar biaya* yang telah ditentukan Ditjenbun.

Tersalurnya kredit pembiayaan dan subsidi bunga pembangunan kebun

Keberhasilan PTPN XIII membangun kebun revitalisasi seluas 1.010 ha sejak tahun 2006-2011 tidak berdampak pada tersalurnya kredit revitalisasi perkebunan yang menggunakan subsidi bunga. PTPN XIII menggunakan dana talangan (*bridging finance*) untuk pembangunan dan pengelolaan tanaman menghasilkan pada program revitalisasi. Pencairan kredit sampai dengan dilakukan penelitian belum berlangsung untuk kredit revitalisasi. Hal ini disebabkan masih terdapat kendala di lapangan baik sisi teknis pelaksanaan, pemenuhan kelengkapan administrasi yang menjadi syarat pemberian kredit KPEN-RP, kebijakan pelaksanaan serta koordinasi antar pihak yang masih lemah.

Terlaksananya konversi Kredit Tepat Waktunya

Pengalihan konversi kredit dilakukan pada saat tanaman mencapai umur menghasilkan dan memenuhi standar teknis yang ditetapkan. Namun, belum adanya pencairan kredit dari pihak perbankan menyebabkan tertundanya pelaksanaan konversi kredit tepat waktunya walaupun beberapa lokasi kebun di Brewebe (tahun tanam 2006), Sindet dan Modang 46 (tahun tanam 2007) sudah menghasilkan dan memenuhi standar kultur teknis yang ditentukan Ditjenbun.

Terealisasi Angsuran Kredit Tepat Pada Waktunya

Realisasi angsuran kredit revitalisasi perkebunan tetap dilakukan oleh pihak PTPN XIII terhadap kebun yang sudah menghasilkan walaupun belum dilakukan pengalihan kredit. Pembayaran angsuran dilakukan dengan pemotongan sebesar 30% dari nilai produksi. Nilai produksi, potongan kredit, operasional perawatan kebun dan pendapatan pekebun peserta revitalisasi dicatat dalam administrasi kebun dan KUD/koptan. Nilai angsuran kredit yang dilakukan pekebun peserta hingga Semester I 2012 mencapai Rp. 808,67 juta (Tabel 4). Biaya eksploitasi dan kewajiban akan diperhitungkan pada saat pengalihan ke Bank. Hal tersebut telah sesuai dengan pedoman umum revitalisasi perkebunan dimana untuk kebun yang telah menghasilkan dan memenuhi standar teknis tetapi belum dapat dikonversi, maka mitra usaha wajib mengadakan pencatatan mengenai hasil kebun yang menjadi hak petani dan disimpan di dalam rekening penampungan/rekening pekebun peserta revitalisasi.

Tabel. 4. Angsuran kredit kebun revitalisasi kebun Plasma Tabara.

Tahun Tanam	Luas (ha)	Nilai Angsuran Kredit (Rp)				Total
		2009	2010	2011	2012*	
2006	100	5.175.226	133.750.411	205.633.579	127.437.052	471.996.268
2007	196	-	-	165.626.177	127.576.819	293.202.996
2008	104	-	-	-	43.476.776	43.476.776
Total	400	5.175.226	133.750.411	371.259.756	298.490.647	808.676.040

Sumber : Kebun Plasma Tabara PTPN XIII, KUD Modang, Timbere, Tiwie Ket*) sampai Juni 2012



Peningkatan Pendapatan Pekebun

Pendapatan pekebun merupakan selisih dari nilai produksi TBS dengan biaya produksi. Nilai produksi ditentukan harga produksi dan produktivitas. Harga TBS sawit pada program revitalisasi ini ditentukan oleh harga ketetapan Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan perkembangan pasar dunia dan permentan mengenai penetapan harga TBS, sehingga faktor harga merupakan yang telah ditetapkan. Untuk itu, tinggi rendahnya pendapatan usaha tani kelapa sawit salah satu dapat ditentukan oleh produktivitas. Produktivitas tanaman juga merupakan salah satu indikator keberhasilan program pengembangan perkebunan (syafaat *et al.*, 2004). Sehingga dalam indikator yang digunakan pada peningkatan pendapatan yaitu peningkatan produktivitas.

Dengan perhitungan menggunakan analisis sederhana, peningkatan produktivitas pada kebun plasma Tabara dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bila diukur dari tingkat produktivitas, pola PSM pada revitalisasi perkebunan mengalami peningkatan produktivitas sebesar 87,56% setiap umur tanaman (Tabel 5) dibandingkan dengan pola KKPA. Pada umur tanaman 4 - 6 tahun, rata-rata produktivitas pola PSM Revitalisasi mencapai 5,12 ton/ha ; 7,32 ton/ha dan 8,6 ton/ha dengan areal seluas 400 ha sedangkan

pada pola KKPA produktivitas hanya mencapai 1,58 ton ; 2,87 ton/ha dan 5,69 ton dari areal seluas 1386 ha. Hal ini besar dipengaruhi oleh prosedur pola PSM pada revitalisasi, dimana setelah masa menghasilkan pihak perusahaan turut serta dalam mengelola kebun bersama KUD/koptan. Pengelolaan lebih fokus dan berdampak pada peningkatan produktivitas. Walaupun terjadi peningkatan produktivitas kebun dengan pola PSM, jika dibandingkan dengan standar produksi PPKS kelas lahan S3, maka kebun revitalisasi masih perlu ditingkatkan agar potensi produksi yang diharapkan dapat tercapai.

Jika ditinjau dari tingkat pendapatan, PSM yang diterapkan dengan pola 30 : 50 : 20 dimana 30% untuk kredit, 50% untuk pengelolaan kebun dan, 20% untuk pekebun peserta dari nilai produksi sebagai pendapatannya. Persentase pendapatan pekebun untuk tahun tanaman 4 - 6 tahun sebesar 42% - 44% dari nilai produksi dengan rata-rata pendapatan perbulan antara Rp 477.890 - Rp 599.962 per KK atau per 2 ha (Tabel 6). Selain mendapatkan persentase 20%, pekebun peserta mendapatkan tambahan penghasilan dari mengerjakan kebunnya sendiri. Namun persentase pendapatan pekebun dengan biaya pengelolaan kebun dapat berubah sesuai dengan kondisi tanaman sesuai dengan (Tabel 7).

Tabel 5. Perbandingan tingkat produktivitas kebun revitaliasi pola PSM dengan KKPA.

Umur tanaman	Produktivitas Program Revitalisasi			Produktivitas Kebun KKPA (ton/ha/tahun)				Standar Produksi PPKS (ton/ha/thn)	
	T.T 2006	T.T 2007	Rata - Rata	T.T 2000	T.T 2001	T.T 2002	T.T 2003		Rata - Rata
3	0,22	-	0,22	-	0,23	0,53	1,30	1,05	4,00
4	4,43	5,80	5,12	0,16	0,94	2,92	2,30	1,58	12,00
5	5,54	9,1	7,32	1,34	1,24	4,89	4,02	2,87	15,00
6	8,60	-	8,60	0,84	4,53	10,19	7,21	5,69	19,00
7	-	-	-	2,74	8,24	12,02	7,43	7,61	23,00
8	-	-	-	8,55	6,11	12,07	7,34	8,52	26,00
9	-	-	-	10,58	8,05	12,60	8,48	9,93	27,00
10	-	-	-	11,49	9,29	21,08	-	13,95	28,00
11	-	-	-	12,56	10,67	-	-	11,61	29,00

Sumber : Kebun Plasma Tabara PTPN XIII(diolah).

Tabel 6. Pendapatan rata-rata pekebun rakyat revitalisasi pola PSM di Plasma Tabara.

Koptan/KUD	Luas (ha)	Tahun Tanam	Pendapatan (Rp/bulan/KK (2 ha))					
			2011			2012*		
			Share Pekebun 20%	Upah Pengelolaan Kebun	Total	Share Pekebun 20%	Upah Pengelolaan Kebun	Total
Palm 46	46	2007	182.303	295.588	477.890	273.869	360.422	634.291
Brewebe	100	2006	225.142	280.743	505.885	259.047	340.915	599.962

Ket*) sampai Juni 2012

Tabel 7. Struktur sistem pembagian nilai produksi sistem PSM kebun revitalisasi Plasma Tabara.

No	Item	2011 (%)			2012*(%)		
		Palm 46	Brewebe	Rerata	Palm 46	Brewebe	Rerata
1	Angsuran Kredit	30	30	30	30	30	30
2	Pengelolaan Kebun						
	Fee KUD	0,89	0,81	0,85	0,81	0,82	0,81
	Fee Kelompok	0,4	0,40	0,43	0,41	0,41	0,41
	Panen	10,7	8,89	9,81	9,73	8,97	9,35
	Muat	1,0	0,81	0,89	0,85	0,83	0,84
	Lansir	4,3	3,64	3,99	2,99	3,67	3,33
	Transport k PKS	11,2	8,09	9,63	10,54	8,97	9,75
	Perawatan kebun	24,5	27,7	26,1	26,4	26,8	26,6
	- TK	15,8	14,87	15,31	13,50	13,51	13,51
	- Bahan dan Alat	8,5	12,20	10,35	12,15	12,78	12,47
	- Biaya Umum	0,3	0,58	0,43	0,73%	0,53	0,63
	Pengelolaan Kebun	53,08	50,29	51,69	51,71	50,48	51,09
3	Petani	16,92	19,71	18,31	18,29	19,52	18,91
4	Pengembalian Dana ke Pekebun	27,4	24,6	26,0	24,1	23,3	23,7
5	Persentase Pekebun	44,36	44,28	44,32	42,37	42,83	42,60

Sumber : Koptan Palm 46 dan KUD Brewebe (Diolah)
Ket*) sampai Juni 2012

Penyerapan Tenaga Kerja

Perkebunan kelapa sawit merupakan sub sektor perkebunan yang menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Rasio kebutuhan tenaga kerja per ha pada perkebunan kelapa sawit sebesar $\pm 0,2-0,3$ orang per ha untuk tenaga kerja kerja buruh harian pada perawatan dan panen (Badrun,2010). Luas kebun revitalisasi di Plasma Tabara seluas 1.010 ha, jika rasio kebutuhan tenaga kerja kelapa sawit tersebut digunakan, maka tenaga kerja yang diperlukan

sebanyak 202-303 orang. Dengan rata-rata kepemilikan lahan sebesar 2 ha, maka pekebun peserta mencapai 550 orang dan lebih dari cukup jika pekebun peserta turut bekerja di kebunnya sendiri. Namun berdasarkan kondisi di lapangan, banyak pekebun peserta yang tidak mau turut serta sebagai tenaga kerja.

Penyebab permasalahan tenaga kerja yaitu :

1. Beberapa kelompok pekebun revitalisasi tidak terbiasa dengan pola pekerjaan di kebun kelapa sawit.



2. Banyaknya kebun pribadi yang dibangun secara swadaya, sehingga pekebun peserta lebih fokus mengurus kebun pribadinya dibandingkan dengan kebun revitalisasi yang mendapat bantuan pengelolaan dari perusahaan.
3. Upah bekerja di luar kebun revitalisasi lebih tinggi.
4. Persaingan untuk mendapatkan tenaga kerja dengan kebun plasma KKPA dan kebun swadaya.

Tercatat hanya 2 kelompok yang anggotanya melakukan pekerjaannya di kebunnya sendiri secara bersama-sama yaitu koptan Modang Palm 46 dan Brewebe. Selain 2 kelompok tersebut, semua kelompok tani menyerahkan kebutuhan tenaga kerjanya kepada pihak PTPN sebagai perusahaan mitra. Hal tersebut menimbulkan fenomena tersendiri dimana sering terjadi kekurangan tenaga kerja di kebun revitalisasi perkebunan sehingga menghambat kegiatan perawatan kebun dan panen.

Hal ini mengakibatkan PTPN XIII sebagai perusahaan mitra PSM kebun revitalisasi mengalami kesulitan dalam menyediakan tenaga kerja sehingga menimbulkan permasalahan tersendiri. Dengan jumlah permintaan tenaga kerja yang melebihi ketersediaan sumberdaya, maka menunjukkan perkebunan kelapa sawit dapat menjadi sumber penyerapan tenaga kerja yang tinggi di Kabupaten Paser.

Pengembangan Wilayah

Keberadaan kebun kelapa sawit akan menimbulkan pengembangan suatu wilayah sebagai salah satu *multiplier effect* yang ditimbulkan (Susila, 2004). Luas lahan pengembangan baru seluas 740 ha dari 1.010 ha (67,3%) dari total kebun revitalisasi yang sebelumnya merupakan lahan terlantar. Dengan terbukanya kebun maka daerah sekitar kebun akan memiliki akses jalan dan perputaran ekonomi. Semester 1 pada 2012, nilai produksi TBS yang dihasilkan dapat mencapai Rp 994,96 juta yang memutar perekonomian daerah sekitarnya dalam bentuk penyediaan barang dan jasa. Nilai tersebut akan semakin besar mengingat tanaman yang dihasilkan masih berumur relatif muda. Hal ini menunjukkan bahwa program revitalisasi perkebunan turut membantu bagi pengembangan wilayah.

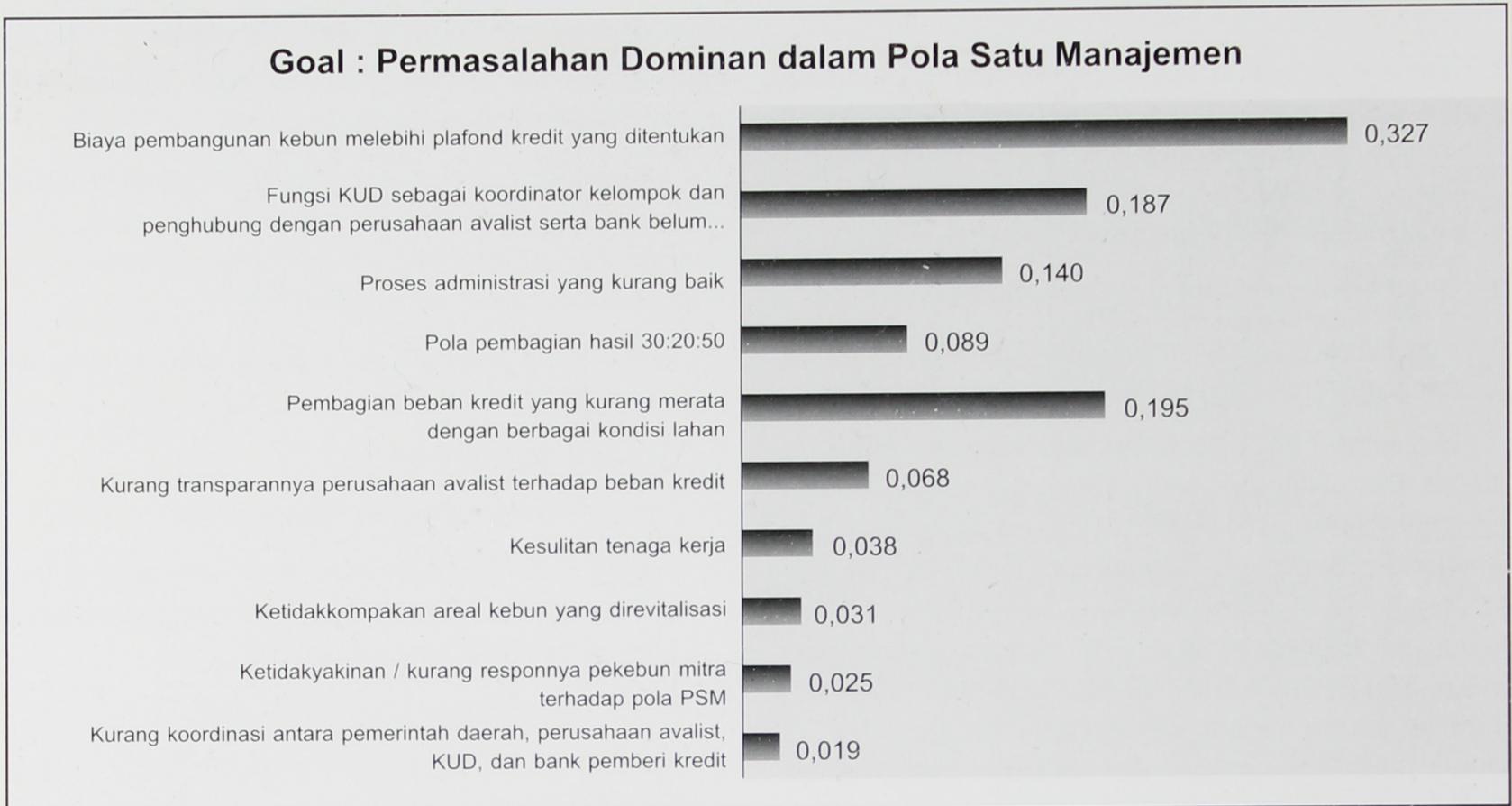
Permasalahan Dalam Pelaksanaan Revitalisasi pola PSM dan Upaya Mengatasinya

Hasil *Focus Discussion Group (FGD)* ditemukan 10 permasalahan dalam pelaksanaan pola satu manajemen pada program revitalisasi perkebunan kelapa sawit di plasma Tabara yaitu :

1. Pembagian beban kredit yang merata dengan berbagai kondisi lahan .
2. Kesulitan tenaga kerja
3. Pola pembagian hasil 30 : 50 : 20
4. Fungsi KUD sebagai koordinator kelompok petani dan penghubung dengan perusahaan avalist serta bank belum berjalan dengan baik
5. Proses administrasi yang kurang baik
6. Kurang transparannya perusahaan avalist terhadap beban kredit.
7. Biaya pembangunan kebun melebihi plafond kredit yang ditentukan.
8. Ketidakyakinan/kurang responnya pekebun mitra terhadap pola PSM.
9. Ketidakkompakan areal kebun yang direvitalisasi.
10. Kurang koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan mitra, KUD, dan bank pemberi kredit.

Faktor permasalahan yang telah diidentifikasi pada *Focus Discussion Group (FGD)* dibandingkan dengan metode perbandingan berpasangan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh satu elemen permasalahan terhadap permasalahan lainnya menurut pendapat responden. Pengolahan data dengan menggunakan *software Expert Choice v.11* menghasilkan matriks pendapat gabungan yang merupakan rata-rata dari pendapat-pendapat individu yang rasio inkonsistensinya kurang dari atau sama dengan 10% (Arti, 2011).

Berdasarkan masukan dari para narasumber yang berasal dari terdiri dari peserta program, ketua dan pengurus koperasi dan kelompok, asisten kebun, manajer kebun, dinas perkeb, kesepuluh permasalahan tersebut ditabulasi dan diolah dengan metode perbandingan berpasangan melalui *software Expert Choice v.11* Hasil pengolahan data dengan



Gambar 1. Faktor permasalahan dominan yang mempengaruhi pelaksanaan Pola PSM pada Program Revitalisasi Perkebunan di Plasma Tabara.

menggunakan *software Expert Choice v.1*, mengurutkan 10 permasalahan tersebut sesuai dengan tingkat prioritasnya. Hasil Pengolahan AHP ditunjukkan pada Gambar 1.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama yang menghambat laju pelaksanaan revitalisasi pola PSM yaitu biaya pembangunan kebun melebihi *plafond* kredit yang ditentukan, fungsi kelembagaan KUD, proses administrasi yang kurang baik, pola pembagian hasil 30:50:20, dan pembagian beban kredit.

Permasalahan pertama yaitu biaya pembangunan kebun yang melebihi *plafond* kredit. Biaya *plafond* kredit yang ditentukan Ditjenbun sangat terbatas. Hal ini berpotensi menimbulkan permasalahan dalam membangun kebun untuk mencapai standar teknis untuk mendukung produktivitas yang optimal. Disamping itu, standar biaya maksimum dijadikan *plafond* kredit revitalisasi tidak mempertimbangkan kenaikan harga input produksi, sehingga biaya perawatan kebun untuk tahun berikutnya tidak mencukupi. sebagai contoh, pada 2008 *plafond* biaya pembangunan kebun di Kalimantan Timur (Wilayah V) sebesar Rp 27.747.000/ha terdiri dari Rp 12.988.000

untuk pembukaan lahan dan penanaman, TBM 1 Rp 5.210.000, TBM 2 Rp 4.844.000, dan TBM 3 Rp 5.705.000. Untuk 2008 biaya pembukaan lahan dan penanaman dapat mencukupi, namun untuk biaya TBM 1-TBM 3 kemungkinan besar terkoreksi akibat kenaikan biaya pembangunan akibat kenaikan upah dan *input* produksi lainnya setiap tahunnya. Konsekuensi yang ditimbulkan dari keterbatasan *plafond* kredit yang ditentukan yaitu :

1. Perusahaan melakukan penambahan biaya sehingga menambah beban pekebun peserta. Jika tidak dilakukan koordinasi dan transparansi yang baik akan menimbulkan konflik antara perusahaan dengan pekebun peserta revitalisasi.
2. Perusahaan mitra mengurangi perawatan, tenaga kerja dan infrastruktur sesuai dengan *plafond* kredit. Hal ini berdampak pada kebun tidak memenuhi standar kultur teknis yang ditetapkan

Permasalahan utama yang kedua adalah Fungsi KUD sebagai koordinator kelompok petani dan penghubung dengan perusahaan *avalist* serta bank belum berjalan dengan baik. Fungsi kelembagaan KUD memiliki peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan revitalisasi. Mulai dari pengumpulan



peserta, persyaratan awal administrasi, operasional dan administrasi, penghubung dengan perusahaan avalist serta bank. Kelembagaan merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan revitalisasi perkebunan (Arifin,2006). Hal ini terlihat di KUD di desa Sawit Jaya. Kelemahan fungsi KUD dalam mengkoordinir kelompok tani dan peserta menghambat hubungan dengan perusahaan dan bank. Hal ini menjadi salah satu penyebab terhambatnya realisasi pelaksanaan revitalisasi untuk replanting hingga 2011 yang seharusnya dilaksanakan pada 2007. Kondisi tersebut juga terjadi di KUD Tiwei dimana kelemahan KUD menghambat proses administrasi dan perawatan kebun sehingga kondisi kebun tidak terawat dan penundaan masa tanam menghasilkan. Disamping itu, jika fungsi KUD tidak berjalan dengan baik terutama mengenai konsistensi penjualan TBS ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) mitra), ke depannya hubungan perusahaan mitra dengan pekebun peserta akan sering terjadi konflik, seperti pola PIR dan KKPA yang diterapkan sebelumnya.

Permasalahan utama yang ketiga yaitu proses administrasi yang tidak baik. Dampak dari tidak baiknya proses administrasi yaitu tertundanya pencairan dan konversi kredit revitalisasi. Konsekuensi yang ditimbulkan PTPN XIII mengeluarkan dana talangan (*bridging finance*) untuk pembangunan dan pengelolaan tanaman menghasilkan pada program revitalisasi. Permasalahan terhambatnya administrasi yang terjadi disebabkan :

1. Ketidaklengkapan administrasi kependudukan seperti KTP dan KK.
2. Ketidaklengkapan sertifikat disebabkan oleh (i) kepemilikan tanah secara komunal yang terkait dengan ahli waris tanah yang melakukan pembukaan lahan secara adat (ii) tumpang tindih kepemilikan lahan (iii) sertifikat tidak sesuai dengan nama kepemilikannya di anggota koperasi.
3. Kepemilikan lahan >4 ha terutama pada lahan replanting akibat proses jual beli. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 33/Permentan/OT.140/7/2006 pengembangan perkebunan revitalisasi untuk masing-masing petani paling luas 4 ha, sehingga tidak bisa diikutsertakan dalam proses administrasi.

Permasalahan utama yang keempat yaitu sistem pembagian hasil 30 : 50 :20. Persepsi tentang sistem tersebut sering menimbulkan polemik. Walaupun penerapannya cukup fleksibel sesuai dengan kondisi kebun namun sistem ini sering menjadi hal yang menghambat pelaksanaan revitalisasi perkebunan dengan pola PSM.

Pembebanan kredit yang sama pada kondisi lahan yang berbeda juga menjadi permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan revitalisasi, terutama pada pembebanan kredit untuk masing-masing pekebun peserta melalui kelompok tani. Permasalahan ini muncul akibat adanya perbedaan kondisi lahan di dalam 1 tahun tanam yang heterogen. Kelompok tani yang memiliki hamparan lahan dengan kondisi lahan yang baik merasa dirugikan dengan pembebanan kredit secara global. Kelompok tani tersebut, tidak mau beban kreditnya sama dengan kebun lainnya, yang secara teknis memerlukan biaya lebih untuk membangun infrastruktur kebun seperti parit drainase, tapak kuda, tapak timbun dan jalan. Hal ini menjadi kendala dalam penentuan beban kredit yang diberikan kepada pekebun peserta/kelompok tani yang berakibat terhambatnya pencairan kredit dan konversi kredit revitalisasi.

Upaya Perbaikan Pelaksanaan Revitalisasi

Konsepsi kemitraan dalam revitalisasi perkebunan diterapkan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah, dengan prinsip keterbukaan, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Dalam prakteknya, konsepsi dan struktur kemitraan yang sudah dirumuskan dengan baik seringkali mengalami berbagai kendala dan bahkan terhenti. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hal tersebut terjadi karena masih adanya sejumlah ketimpangan dalam pelaksanaan pemberdayaan yang menjadi inti dalam pelaksanaan kemitraan (Fajar,2006). Berdasarkan kajian pelaksanaan revitalisasi perkebunan yang dilakukan di plasma Tabara yang menganut pola PSM, upaya perbaikan yang perlu dilakukan dalam mekanisme pelaksanaan pola PSM yaitu :

Pemenuhan Ketentuan Standar Persyaratan Lahan

Pemenuhan standar persyaratan lahan sangat dibutuhkan agar memenuhi syarat teknis dan ekonomis. Ketidakterpenuhi syarat kelas kesesuaian

lahan dan lahan-lahan marginal yang membutuhkan investasi yang tinggi sering dilakukan kelompok tani/KUD dan perusahaan untuk dibiayai oleh revitalisasi. Hal ini mengakibatkan penambahan biaya yang sangat besar yang jauh dari ketentuan biaya maksimum pembangunan kebun revitalisasi yang ditentukan oleh Ditjenbun. Koordinasi yang kuat perlu dilakukan dalam pemenuhan ketentuan kriteria lahan yang diajukan antara *stakeholder* yang terkait yaitu calon/pekebun rakyat, perusahaan mitra, dinas perkebunan dan pihak perbankan.

Perbaikan Mekanisme Besaran Satuan Maksimum Biaya Pembangunan Kebun Revitalisasi

Ketentuan besaran maksimum biaya pembangunan kebun revitalisasi yang ditetapkan pemerintah sudah didasari oleh kondisi lahan yang standar, kondisi per wilayah, kondisi lahan (lahan basah dan lahan kering) yang dirumuskan oleh *stakeholder* terkait. Namun yang beberapa upaya perbaikan mengenai ketentuan tersebut yaitu :

- a. Penambahan ketentuan Besaran biaya bagi kondisi lahan marginal, mengingat lahan yang tersedia untuk pengembangan kebun kelapa sawit pada umumnya lahan marginal seperti lahan bergelombang berbukit dan rawa pasang surut.
- b. Adanya survei terhadap harga pasar input produksi, upah tenaga kerja, kondisi sosial ekonomi wilayah, dengan mempertimbangkan faktor inflasi setiap tahunnya
- c. Agar besaran biaya pembangunan kebun revitalisasi tepat berdasarkan kondisi daerah, maka ketentuan besaran biaya tersebut dapat diserahkan oleh pemerintah daerah berdasarkan kesepakatan bersama dengan KUD atau asosiasi pekebun, perusahaan mitra, pihak perbankan dan *stakeholder* lainnya yang terkait dengan tetap memperhatikan ketentuan dari pemerintah pusat.

Penguatan KUD dan Koptan

Keberadaan KUD dan Koptan sangat strategis dalam keberhasilan pelaksanaan revitalisasi perkebunan. Untuk itu, beberapa upaya yang dilakukan untuk penguatan kelembagaan KUD/koptan yaitu :

a. Penguatan struktur kelembagaan

Struktur kelembagaan menggambarkan fungsi dan hierarki suatu organisasi/kelembagaan. Untuk itu upaya penyempurnaan struktur dan fungsi organisasi dibentuk dengan pola yang jelas dan mudah dipahami untuk mencapai tujuan bersama. Dengan struktur dan fungsi organisasi yang kuat maka penerapan sistem manajemen kebun revitalisasi perkebunan pola PSM akan berjalan dengan baik.

b. Memperkuat penegakkan aturan

Agar KUD/koptan kuat dalam menjalankan fungsinya diperlukan penegakan aturan. KUD/koptan hendaknya membuat aturan yang disepakati bersama untuk menjalankan program revitalisasi dengan pola PSM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti penegakkan aturan berupa sanksi dalam koptan bagi anggota yang tidak mengikuti kegiatan rutin perawatan kebun dan panen, sanksi penjualan TBS di luar mitra usaha, sanksi tidak mengikuti pertemuan, dan memanen TBS mentah. Selain itu, pemberian insentif bagi anggota yang melakukan perawatan kebun dengan baik juga perlu dilakukan untuk memotivasi pekebun untuk melakukan pemeliharaan kebun secara optimal.

c. Penguatan Proses Legitimasi Kepemimpinan

Proses legitimasi terutama terhadap kepemimpinan dan produk kesepakatan yang terkait dengan norma, tata aturan dan nilai sosial di dalam masyarakat. Disini kewibawaan tokoh pemimpin sangat menentukan keabsahan keputusan tersebut (Suradisastira, 2011). Faktor kepemimpinan yang kuat dan keteladanan ketua kelompok di plasma Tabara sangat mempengaruhi keberhasilan revitalisasi dan kemitraan lainnya seperti KKPA dan PIR. Fungsi KUD/koptan banyak yang tidak berjalan akibat tidak adanya legitimasi kepemimpinan. Oleh karena itu, perlu adanya proses pemilihan kepemimpinan KUD/Koptan yang demokratis dan secara resmi diakui oleh anggota KUD/Koptan tersebut.

Transparansi dan Akuntabilitas

Tranparansi merupakan landasan utama dalam setiap hubungan kemitraan. Sikap keterbukaan (transparansi) pengelolaan antara perusahaan mitra

dengan pekebun rakyat merupakan kunci sukses dalam pengelolaan kemitraan (Global Humanitarian Platform, 2007). Transparansi terhadap administrasi, keuangan, pengelolaan dan perawatan kebun, serta sistem 30 : 50 20 merupakan kunci keberhasilan dalam menangani berbagai hambatan yang dialami dalam pelaksanaan revitalisasi perkebunan.

Pemberdayaan Pekebun rakyat

Pola PSM pada program revitalisasi perkebunan merupakan pola pengelolaan/ manajemen kebun secara bersama antara perusahaan mitra dengan kelompok tani. Pemberdayaan berarti memanfaatkan secara optimal berbagai kemampuan, nilai atau norma serta kelembagaan yang ada dalam masyarakat termasuk juga menumbuh kembangkan daya usaha kelompok masyarakat yang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan sendiri (Suradisastra, 2011). Pola PSM ini sangat baik untuk memberdayakan petani dalam pengelolaan kebun, transfer teknologi dan manajemen keuangan pekebun rakyat. Namun berdasarkan hasil penelitian, banyak pekebun peserta revitalisasi menyerahkan pengelolaan kebunnya kepada KUD. Beberapa KUD menyerahkan operasional perawatan kebun kepada perusahaan dan hanya peduli terhadap hasilnya saja. Hal ini membuat pekebun peserta revitalisasi tidak mandiri dan tidak terberdayakan. Untuk itu perlu adanya sistem pemberdayaan pekebun peserta melalui penyuluhan dan pendampingan secara konsisten dengan berbagai materi, tidak hanya aspek kultur teknis tetapi juga berbagai aspek manajemen pengelolaan keuangan kebun, aspek manajemen organisasi. Dengan adanya penyuluhan dan pendampingan tentunya akan meningkatkan ikatan emosional (kebersamaan, saling percaya) antara pekebun dengan perusahaan mitra (Husein dan Hanafi, 2005).

Perbaikan Administrasi

Kelengkapan administrasi dari pihak calon petani, perusahaan mitra, maupun administrasi lahan harus segera diperbaiki agar proses pencairan dan konversi kredit dapat dilakukan. Hal ini untuk memberi keyakinan kepada pekebun peserta terhadap pola PSM. Upaya yang dilakukan dalam perbaikan administrasi ini dilakukan dengan koordinasi dengan

berbagai pihak baik dengan koperasi dan kelompok tani, perbankan, pemerintah daerah dan dengan kantor direksi yang merupakan pengambil kebijakan tertinggi di perusahaan. Penyederhanaan proses birokrasi juga perlu dilakukan agar proses pengajuan kredit berjalan secara efisien.

KESIMPULAN

Pola PSM yang diterapkan pada program revitalisasi perkebunan dapat dilakukan untuk menjaga agar kualitas kebun tetap sesuai dengan baku teknis yang ada meskipun dialihkan kepemilikan kebun kepada pekebun peserta, sehingga terjamin kepastian dan keberlanjutan usaha. Hasil penelitian terhadap Pekebun Plasma di Kebun Plasma Tabara-PTPN XIII menunjukkan bahwa program pembangunan kebun pola PSM telah meningkatkan produktivitas kebun. Namun demikian, pelaksanaan pola PSM masih menghadapi kendala, baik dalam hal pembagian beban kredit, kurang maksimalnya fungsi KUD, sistem administrasi yang kurang baik, maupun kurang koordinasi antara pihak terkait. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perbaikan mulai dari kegiatan perencanaan maupun operasional pengelolaan kebun.

DAFTAR PUSTAKA

- Arti, D.B. 2011. Analisis strategi kebijakan pemerintah terkait dengan perkembangan industri kelapa sawit nasional (Studi Kasus di PTPN IV, Medan Sumatera Utara). Thesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
- Arifin. B. 2006. Pembangunan Pertanian Paradigma Kebijakan dan Strategi Revitalisasi. Grasindo. Jakarta
- Bastian, I. 2006. Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Badrun, M. 2010. Tonggak perubahan : melalui PIR kelapa sawit membangun negeri. Jakarta : Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2007. Pedoman umum program revitalisasi perkebunan (kelapa sawit, karet, dan kakao). Kementerian Pertanian, Jakarta.

- Dja'far, R. Amalia, dan A. Jatmika. 2012. Analisa faktor permasalahan dominan yang mempengaruhi pelaksanaan program revitalisasi perkebunan kelapa sawir rakyat. *Jurnal Penelitian Kelapa Sawit* Vol.20(1) April 2012 hal 1-11. Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Medan.
- Fadjar, U. 2006. Kemitraan usaha perkebunan perubahan struktur yang belum lengkap. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Volume 24.1: 46-60.
- Global Humanitarian Platform, 12 Juli 2007. Principless of partnership: A Statement of Comitment. www.globalhumanitarianplatform.org. diakses tanggal 10 Desember 2011.
- Husein, H. dan Hanafi. 2005. Peranan pemerintah daerah dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat. *Prosiding Seminar Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat: Pemberdayaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Kerakyatan*. Pekanbaru, 15 -16 April 2005.
- Kementrian Perdagangan. 2012. Perkembangan ekspor non migas Indonesia. www.kemendag.go.id diakses Juli 2012.
- Kriyantono. 2006. Teknik praktis riset komunikasi. Prenada Media Group. Jakarta.
- Lubis, A.U. 2008. Kelapa sawit (*Elaeis guineensis* Jacq.) di Indonesia. Edisi 2. Pusat Penelitian Kelapa Sawit. Medan.
- Rajekshah, M. 2009. Tinjauan yuridis terhadap prinsip kemitraan dalam pengelolaan hak atas tanah usaha perkebunan berdasarkan program revitalisas perkebunan. Tesis. Universitas Sumatera Utara.
- Rustiani, F., H. Sjaifudian, dan R. Gunawan 1997. Mengenal usaha pertanian kontrak (Contract Farming). Yayasan Akatiga, Bandung.
- Saaty, T.L. 2008. Decision making with the analytic hierarchy process. *International Journal Services Sciences*, Vol.1, No.1, hal. 83- 98.
- Saptana. 2006. Keunggulan komparatif-kompetitif dan strategi kemitraan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Bogor.
- Singarimbun, M. dan E. Sofian. 1989. Metode penelitian survei. LP3ES. Jakarta.
- SPKS. 2011. Revitalisasi perkebunan rugikan petani. <http://serikatpetanikelapasawit.blogspot.com>.
- Sugiyono. 2009. Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D, Bandung Alfabeta. Hal 116
- Suradisastra, K. 2011. Revitalisasi kelembagaan untuk mempercepat pembangunan sektor pertanian dalam era otnomi daerah. *Jurnal Pengembangan Inovasi Pertanian*. Vol.4 (20: 118-136).
- Susila, W.Y. 2004. Contribution of oil palm industry to economic growth and poverty alleviation in Indonesia. *Jurnal Litbang Pertanian* 23(3): 107-114
- Syafaa't, N., F. Supena, M. Sudi, dan Suryadi. 2004. Kinerja nilai tambah dan produksi sektor pertanian. PSE Litbang Deptan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Zuhri, S. 2011. Revitalisasi perkebunan baru terealisasi 6,2%. <http://www.Bisnis.com>.



INDEKS PENGARANG

Abdullah, Ilmi	49
Agustira, M.A.	12, 79, 139
Agusnar, H.	124
Amelia, R.	1, 79, 139
Dja'far	1
Herawan, T.	93, 124, 131
Hasibuan, H.A.	33
Jatmika, A.	1, 12
Nainggolan, H.	72
Napitupulu, F.H.	49
Nasrullah	42
Nuryanto, E.	124
Priwiratama, H.	24
Pangaribuan, Y.	64
Purba, A.R.	42
Prasetyo, A.E.	103, 114
Rivani, M.	93, 131
Siahaan, D.	33, 131
Susilawati	72
Susanto, A.	24, 103, 114
Tulus	49
Wahyono, T.	79, 139
Wirjosentono, B.	124
Yudanto, B.G.	49
Yenny, Y.	42



INDEKS SUBYEK

Agresivitas	103	Matriks	131
<i>Analytical hierarchi process</i> (AHP)	1	Metsulfuron metil	24
Antagonis	24	Minyak	42
Asam lemak sawit distilat	124	Minyak sawit	124
<i>Asystasia intrusa</i>	24	Pagar individu	114
Babi hutan	114	Pasang surut	12
Biomasa	49	Pembiayaan	12
<i>Blup</i>	42	Pemisahan	124
<i>Cocoa butter substitute</i>	33	Pengembangan	79
Cokelat <i>milk</i>	33	Pengendalian	114
Cokelat <i>dark</i>	33	Pengolahan air gambut	72
<i>Conching</i>	33	Perkebunan rakyat	1
<i>Cyclosorus aridus</i>	24	Perkebunan	79
Destilasi molekuler	124,131	Populasi tinggi	64
Dinamika populasi	103	Populasi normal	64
<i>Elaeidobius kamerunicus</i>	103	Produktivitas	64
Elektrokoagulasi	72	PSM	139
Ester merah	131	Rakyat	79
Finansial	12	Rasio udara	49
<i>Fruit set</i>	103	Revitalisasi	139
Glifosat	24	Revitalisasi perkebunan	1, 12
Gliserol	93	<i>Rivina humilis</i>	24
Gliserol karbonat	93	Serat	49
Karbonilasi	93	<i>Setaria plicata</i>	24
Karotenoid sawit	131	Suhu	131
Katalis kimia heterogen	93	Tawas	72
Kelapa Sawit	42,64, 79, 103,114, 139	Udara pembakaran	49
Kemitraan	79, 139	Udara primer	49
Kerapatan tanam	64	Udara sekunder	49
Koordinasi	1	Varietas	64
Landak	114		